

— **STATISTIK** —
PENDIDIKAN
KABUPATEN WAKATOBI
2017



— STATISTIK —
PENDIDIKAN
KABUPATEN WAKATOBI
2017



Statistik Pendidikan Kabupaten Wakatobi 2017

Nomor ISBN : -
Nomor Publikasi : 74070.1814
Katalog BPS : 4301002.7407

Ukuran Buku : 17.6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 54 halaman

Naskah
Seksi Statistik Sosial
BPS Kabupaten Wakatobi

Penyunting
BPS Kabupaten Wakatobi

Gambar Kulit
BPS Kabupaten Wakatobi

Diterbitkan oleh
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi

Dicetak oleh

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar

Publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 merupakan lanjutan dari publikasi sebelumnya yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Wakatobi. Publikasi ini memuat berbagai informasi umum terkait kondisi dan refleksi perkembangan pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Wakatobi, yaitu menyangkut masalah Angka Melek Huruf (AMH), pendidikan anak usia dini, rasio murid-guru, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, tingkat pendidikan, sampai dengan akses teknologi informasi di tingkat wilayah Kabupaten Wakatobi. Data-data pokok yang digunakan sebagian besar bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diolah BPS Kabupaten Wakatobi serta data-data lain yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan penunjang analisis.

Kami menyadari meskipun telah diupayakan secara maksimal, akan tetapi publikasi ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wangi-wangi, September 2018
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Wakatobi
Kepala,



Ade Ida Mane, S.ST, M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	xi
Ringkasan	1
Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sumber Data	4
Istilah Teknis	5
Kondisi Pendidikan Kabupaten Wakatobi Tahun 2017	11
3.1 Angka Melek Huruf	11
3.2 Pendidikan Anak Usia Dini	13
3.3 Rasio Murid-Guru	15
3.4 Partisipasi Sekolah	17
3.5 Rata-rata Lama Sekolah	21
3.6 Harapan Lama Sekolah	23
3.7 Tingkat Pendidikan	24
3.8 Akses Teknologi Informasi	27
Lampiran	33

Daftar Tabel

No	Judul Tabel	Hal
1	Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru pada Jenjang Pendidikan TK sederajat di Kabupaten Wakatobi, 2017	15
2	Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru pada Jenjang Pendidikan SD sederajat di Kabupaten Wakatobi, 2017	15
3	Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru pada Jenjang Pendidikan SMP sederajat di Kabupaten Wakatobi, 2017	16
4	Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru pada Jenjang Pendidikan SMA sederajat di Kabupaten Wakatobi, 2017	16
5	Rasio Murid-Sekolah dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Wakatobi, 2017	17
6	Umur Standar di Setiap Jenjang Pendidikan	19
7	Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Status Bersekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (persen), 2017	25
8	Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (persen), 2017	26
L1	Jumlah Sekolah di Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2017	35
L2	Jumlah Murid di Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2017	35
L3	Jumlah Guru di Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2017	36
L4	Jumlah Sekolah di Luar Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2017	36
L5	Jumlah Murid di Luar Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2017	37
L6	Jumlah Guru di Luar Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2017	37
L7	Jumlah Sekolah Setingkat Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017	38

L8	Jumlah Sekolah Setingkat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017	38
L9	Jumlah Sekolah Setingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017	39
L10	Jumlah Sekolah Setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017	39
L11	Jumlah Murid Setingkat Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017	40
L12	Jumlah Murid Setingkat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017	40
L13	Jumlah Murid Setingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017	41
L14	Jumlah Murid Setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017	41
L15	Jumlah Guru Setingkat Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017	42
L16	Jumlah Guru Setingkat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017	42
L17	Jumlah Guru Setingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017	43
L18	Jumlah Guru Setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017	43
L19	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Binongko, 2017	44
L20	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Togo Binongko, 2017	45

L21	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Tomia, 2017	46
L22	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Tomia Timur, 2017	47
L23	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Kaledupa, 2017	48
L24	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Kaledupa Selatan, 2017	49
L25	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Wangi-Wangi, 2017	50
L26	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 2017	51
L27	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kabupaten Wakatobi, 2017	52
L28	Jumlah Alumni di Perguruan Tinggi menurut Lembaga Pendidikan di Wakatobi, TA 2017/2018	53
L29	Jumlah Dosen Pengajar pada Perguruan Tinggi menurut Lembaga Pendidikan di Wakatobi, TA 2017/2018	53
L30	Jumlah Mahasiswa Terdaftar pada Perguruan Tinggi menurut Lembaga Pendidikan di Wakatobi, TA 2017/2018	53

Daftar Grafik

No	Judul Grafik	Hal
1	Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi, 2017	12
2	Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wakatobi, 2017	12
3	Persentase Anak Umur 0-6 Tahun yang Sedang dan Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah Dirinci Menurut Kelompok Umur, 2017	14
4	Angka Partisipasi Sekolah Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi, 2017	18
5	Angka Partisipasi Kasar Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (persen), 2017	20
6	Angka Partisipasi Murni Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (persen), 2017	21
7	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Wakatobi dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2010-2017	22
8	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wakatobi dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2010-2017	23
9	Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Bersekolah Dirinci Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wakatobi (persen), 2017	25
10	Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (persen), 2017	27
11	Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Dirinci Menurut Media Mengakses Internet di Kabupaten Wakatobi, 2017	28
12	Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Dirinci Menurut Lokasi Mengakses Internet di Kabupaten Wakatobi, 2017	29
13	Persentase Pengguna Internet Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Wakatobi, 2017	30

- 14 Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Dirinci Menurut Tujuan Mengakses Internet di Kabupaten Wakatobi, 2017 31

<https://wakatobikab.bps.go.id>

Ringkasan

1. Pada tahun 2017, terjadi peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) di Wakatobi bila dibandingkan dengan tahun 2016. AMH meningkat dari 92,83 persen menjadi 94,71 persen. AMH penduduk laki-laki mencapai 96,06 persen, lebih tinggi daripada AMH penduduk perempuan yang mencapai 93,52 persen.
2. Pada tahun 2017, dari total penduduk Kabupaten Wakatobi umur 0-6 tahun, sepertiganya, yakni 31,59 persen masih/pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran 2016/2017, sedangkan yang pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran 2015/2016 atau ajaran sebelumnya sekitar 6,81 persen.
3. Rasio murid-guru di Kabupaten Wakatobi sudah cukup baik. Untuk TK Sederajat rasio murid-guru sekitar 8,44; SD Sederajat rasio murid-guru sekitar 12,22; sedangkan rasio murid-guru untuk SMP Sederajat sekitar 9,25; dan rasio murid-guru untuk SMA Sederajat sekitar 9,93.
4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) umur 7-12 tahun mencapai 98,74 persen, APS umur 13-15 tahun 96,81 persen, sedangkan APS umur 16-18 tahun hanya sebesar 85,53 persen, dan APS umur 19-24 tahun adalah sebesar 20,96 persen.
5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD mencapai 111,48 persen. APK terus menurun pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Adapun APK pada jenjang SMP adalah 98,67 persen, pada jenjang SMA sebesar 84,65 persen, dan pada jenjang diploma ke atas adalah sebesar 28,63 persen.
6. Untuk jenjang SD (7-12 tahun) Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tahun 2017 sekitar 96,88 persen. APM SMP (13-15 tahun) mencapai angka 79,82 persen, APM SMA (16-18 tahun) hanya mencapai 62,34 persen, dan APM untuk jenjang Diploma ke atas hanya mencapai angka 12,94 persen.
7. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Wakatobi di tahun 2017 adalah 7.71 tahun. Adapun harapan penduduk Kabupaten Wakatobi yang berumur 7 tahun ke atas mengenyam bangku sekolah selama 13,14 tahun.

8. Pada tahun 2017, penduduk Wakatobi berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah sekitar 4,24 persen. Sementara yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai SD mencapai 26,02 persen.
9. Pada tahun 2017, penggunaan telepon selular meningkat 8,54 persen dibanding tahun 2016 menjadi 67,76 persen. Peningkatan pengguna telepon selular sebanding dengan peningkatan pengguna internet. Pada tahun 2017, secara umum terjadi peningkatan sebesar 1,27 persen terhadap penduduk umur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir dari waktu pencacahan, dari 18,60 persen di tahun sebelumnya menjadi 19,87 persen.
10. Pada tahun 2017, dari seluruh pengguna internet umur 5 tahun ke atas, sekitar 87,93 persen mengakses melalui media HP.

<https://wakatobikab.bps.go.id>

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan

pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Berangkat dari kesadaran pentingnya indikator-indikator pendidikan guna mendapatkan gambaran atau kondisi dan pencapaian di bidang pendidikan di Kabupaten Wakatobi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi menyusun publikasi berjudul **"Statistik Pendidikan Kabupaten Wakatobi 2017"**.

Publikasi ini menampilkan indikator-indikator umum pendidikan dan perbandingan kondisi pada tahun 2017 dengan tahun sebelumnya. Beberapa istilah yang digunakan juga ditampilkan guna membantu para pengguna data dalam menginterpretasikan dan melakukan analisis atas informasi yang disajikan.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam publikasi Statistik Pendidikan ini adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Wakatobi dan sarana pendidikan yang tersedia di Kabupaten Wakatobi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Diterbitkannya publikasi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data dasar bidang pendidikan di Kabupaten Wakatobi bagi seluruh pengguna data baik pemerintah maupun swasta.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyajian publikasi ini yaitu:

1. Memberikan gambaran kondisi dan pencapaian bidang pendidikan lebih rinci menurut aspek jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan daerah tempat tinggal.
2. Penyediaan indikator utama di bidang pendidikan, serta
3. Menjadi informasi awal bagi pihak pemerintah dan swasta dalam menyusun kebijakan dan strategi di bidang pendidikan.

1.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk data agregat dan komposisi penduduk diperoleh dari proyeksi penduduk;
2. Untuk indikator-indikator pendidikan diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017;
3. Data jumlah sarana pendidikan dan pendukungnya didapat dari data sekunder yang dikumpulkan dari instansi terkait, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi.

Istilah Teknis

Daerah perkotaan adalah suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.

Daerah perdesaan adalah suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.

Penduduk ialah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

Angka Melek Huruf (AMH) ialah perbandingan antara jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis/melek huruf dan jumlah seluruh penduduk umur 15 tahun ke atas di suatu negara atau daerah.

Rumus:

$$AMH_{15+}^t = \frac{MH_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$$

$$ABH_{15+}^t = \frac{BH_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$$

Keterangan:

- AMH_{15+}^t : Angka Melek Huruf penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun t
- ABH_{15+}^t : Angka Buta Huruf penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun t
- MH_{15+}^t : Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun t yang melek huruf
- BH_{15+}^t : Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun t yang buta huruf

P_{15+}^t : Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun t

Manfaat:

Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

Rumus:

$$APK_{SD} = \frac{P_{SD}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

$$APK_{SMP} = \frac{P_{SMP}}{P_{13-15}} \times 100\%$$

$$APK_{SMA} = \frac{P_{SMA}}{P_{16-18}} \times 100\%$$

Keterangan:

P_{SD} : Jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SD atau sederajat

P_{7-12} : Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun

P_{SMP} : Jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMP atau sederajat

P_{13-15} : Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun

P_{SMA} : Jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA atau sederajat

P_{16-18} : Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun

Manfaat:

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap seluruh anak pada kelompok umur tersebut.

Rumus:

$$APM_{SD} = \frac{P_{7-12(SD)}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

$$APM_{SMP} = \frac{P_{13-15(SMP)}}{P_{13-15}} \times 100\%$$

$$APM_{SMA} = \frac{P_{16-18(SMA)}}{P_{16-18}} \times 100\%$$

Keterangan:

- $P_{7-12(SD)}$: Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang SD atau sederajat
- P_{7-12} : Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun
- $P_{13-15(SMP)}$: Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP atau sederajat
- P_{13-15} : Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun
- $P_{16-18(SMA)}$: Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang SMA atau sederajat
- P_{16-18} : Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun

Manfaat:

Untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat batasan umur.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai.

Rumus:

$$APS_{7-12} = \frac{P_{7-12(Masih Sekolah)}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

$$APS_{13-15} = \frac{P_{13-15(Masih Sekolah)}}{P_{13-15}} \times 100\%$$

$$APS_{16-18} = \frac{P_{16-18(Masih Sekolah)}}{P_{16-18}} \times 100\%$$

Keterangan:

- $P_{7-12(Masih Sekolah)}$: Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang masih bersekolah
- P_{7-12} : Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun
- $P_{13-15(Masih Sekolah)}$: Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang masih bersekolah

P_{13-15}	: Jumlah penduduk berumur 13 -15 tahun
P_{16-18} (<i>Masih Sekolah</i>)	: Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun yang masih bersekolah
P_{16-18}	: Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun

Manfaat:

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu.

Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling/MYS) merupakan jumlah tahun yang digunakan penduduk berumur 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Rumus:

Rata-rata Lama Sekolah untuk yang partisipasi sekolahnya Masih Bersekolah dan Tidak Bersekolah Lagi namun "Tidak Tamat":

$$MYS = \text{Tahun Konversi} + \text{Kelas Tertinggi yang pernah diduduki} - 1$$

Rata-rata Lama Sekolah untuk yang partisipasi sekolahnya Tidak Bersekolah Lagi dan "Sudah Tamat":

$$MYS = \text{Tahun Konversi} + \text{Kelas Tertinggi yang pernah diduduki}$$

Adapun Tahun Konversi dari Pendidikan yang Ditamatkan adalah:

SD sederajat	: 6 tahun
SMP sederajat	: 9 tahun
SMA sederajat	: 12 tahun
Diploma I	: 13 tahun
Diploma II	: 14 tahun
Akademi/Diploma III	: 15 tahun
Sarjana/Diploma IV	: 16 tahun
Pasca Sarjana/S2	: 18 tahun
Doktor/S3	: 21 tahun

Manfaat:

Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling/EYS) adalah rata-rata lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Rumus:

$$HLS_{\alpha}^t = FK \times \sum_{i=\alpha}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLS_{α}^t : Harapan Lama Sekolah pada umur α di tahun t

E_i^t : Jumlah penduduk umur i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t : Jumlah penduduk umur i pada tahun t

i : Umur ($\alpha, \alpha + 1, \dots, n$)

FK : Faktor koreksi pesantren

Faktor koreksi pesantren dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$FK = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk usia tujuh tahun ke atas}} + 1$$

Keterangan:

- Jumlah santri sekolah dan mukim = rasio santri mukim dikalikan dengan jumlah santri sekolah
- Rasio santri mukim = jumlah santri bermukim dibagi dengan jumlah santri seluruhnya

Manfaat:

Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Rasio Murid-Guru adalah rata-rata jumlah murid/siswa per guru di tingkat pendidikan tertentu pada tahun ajaran tertentu.

Rumus:

$$\text{Rasio}(M - G)_h^t = \frac{M_h^t}{G_h^t}$$

Keterangan:

$\text{Rasio}(M - G)_h^t$: Rasio murid-guru di tingkat pendidikan h pada tahun ajaran t

- M_h^t : Jumlah murid/siswa yang terdaftar di tingkat pendidikan h pada tahun ajaran t
- G_h^t : Jumlah guru yang terdaftar di tingkat pendidikan h pada tahun ajaran t

Manfaat:

Untuk menggambarkan beban kerja seorang guru dalam mengajar dan untuk melihat mutu pengajaran di kelas.

<https://wakatobikab.bps.go.id>

Kondisi Pendidikan Kabupaten Wakatobi Tahun 2017

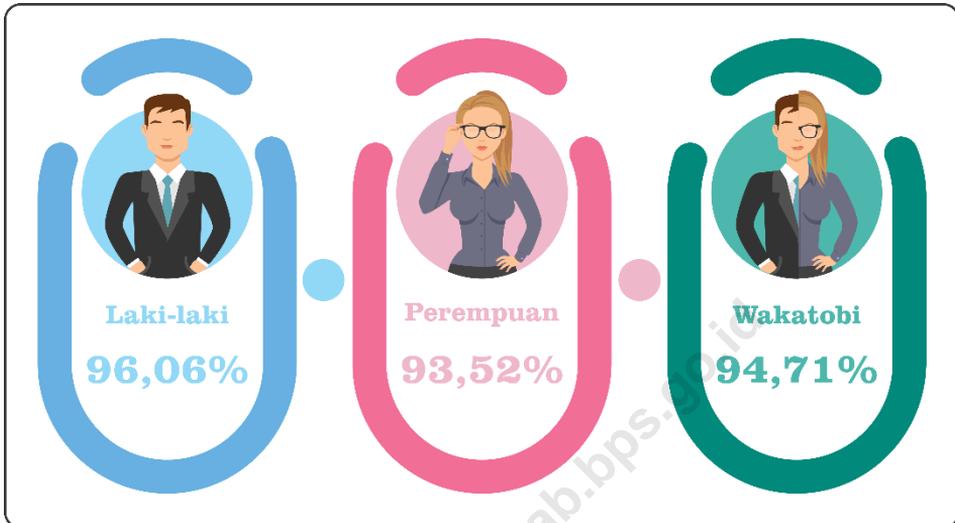
3.1 Angka Melek Huruf

Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya serta memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca dan menulis untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Angka melek huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Program pemberantasan buta huruf sebetulnya sudah berjalan sejak zaman kemerdekaan, namun dalam perjalanannya terjadi pasang surut bahkan dalam sejarahnya, Indonesia pernah memproklamkan bebas buta huruf. Tetapi karena tidak dipergunakan keterampilan tersebut menyebabkan banyak yang menjadi buta huruf kembali. Program pemberantasan buta huruf mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta berketerampilan. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut, memungkinkan seorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan tenaga lokal yang potensial guna mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya. Bagi pendidikan, persekolahan diharapkan akan mampu menekan angka putus sekolah di pendidikan persekolahan.

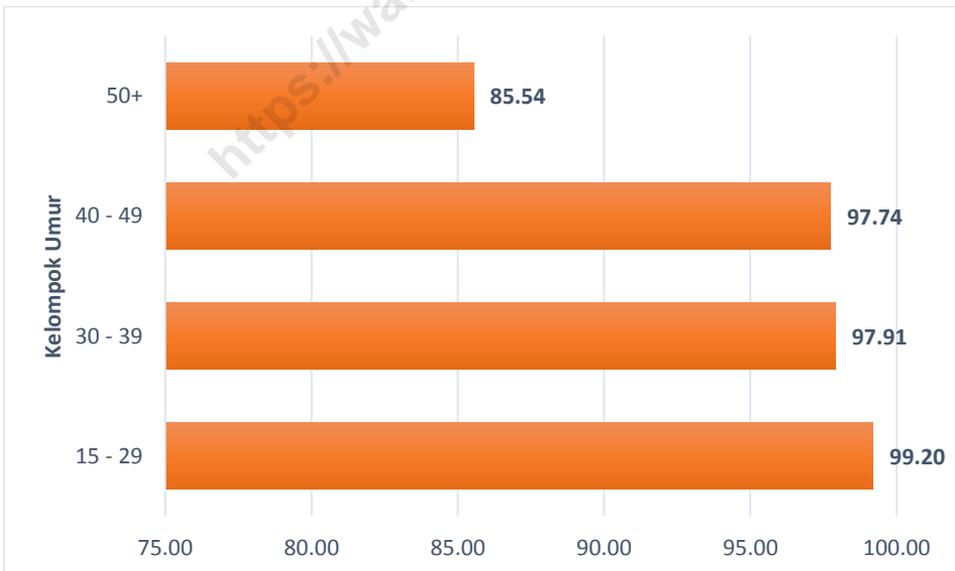
Pada tahun 2017, terjadi peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk umur 15 tahun ke atas di Kabupaten Wakatobi bila dibandingkan dengan tahun 2016. AMH meningkat dari 92,83 persen menjadi 94,71 persen. Berdasarkan jenis kelamin, AMH penduduk laki-laki (96,06 persen) lebih tinggi daripada penduduk perempuan (93,52 persen). Namun demikian, pemerintah tetap harus terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah agar angka buta huruf dapat semakin turun dari tahun ke tahun mengingat bahwa Indonesia pernah memproklamkan bebas buta huruf. Selain itu, kemampuan membaca dan menulis itu akan sangat dibutuhkan untuk menunjang pada kehidupan sehari-hari.

Grafik 1. Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, diolah

Grafik 2. Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wakatobi, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, diolah

Jika ditinjau menurut kelompok umur seperti yang ditampilkan pada Grafik 2, maka dapat dilihat bahwa buta huruf sebagian besar terjadi pada kelompok umur tua (50 tahun ke atas). AMH terbesar terdapat pada kelompok umur 15-29

tahun yaitu sebesar 99,20 persen. Pada kelompok umur 40-49 tahun, AMH mencapai 97,74 persen, lebih rendah dibandingkan kelompok umur 30-39 tahun yaitu sebesar 97,91 persen. Bahkan pada kelompok umur 50 tahun ke atas AMH menjadi semakin rendah yakni 85,54 persen. Dari Grafik 2, kita dapat melihat bahwa semakin tua kelompok umurnya maka angka buta hurufnya pun akan semakin besar. Memang tidak mudah untuk menerapkan program pemberantasan buta huruf terhadap penduduk yang sudah berumur. Diperlukan kesadaran dan peran aktif dari yang bersangkutan untuk mengikuti program keaksaraan fungsional yang terus dikembangkan oleh pemerintah.

3.2 Pendidikan Anak Usia Dini

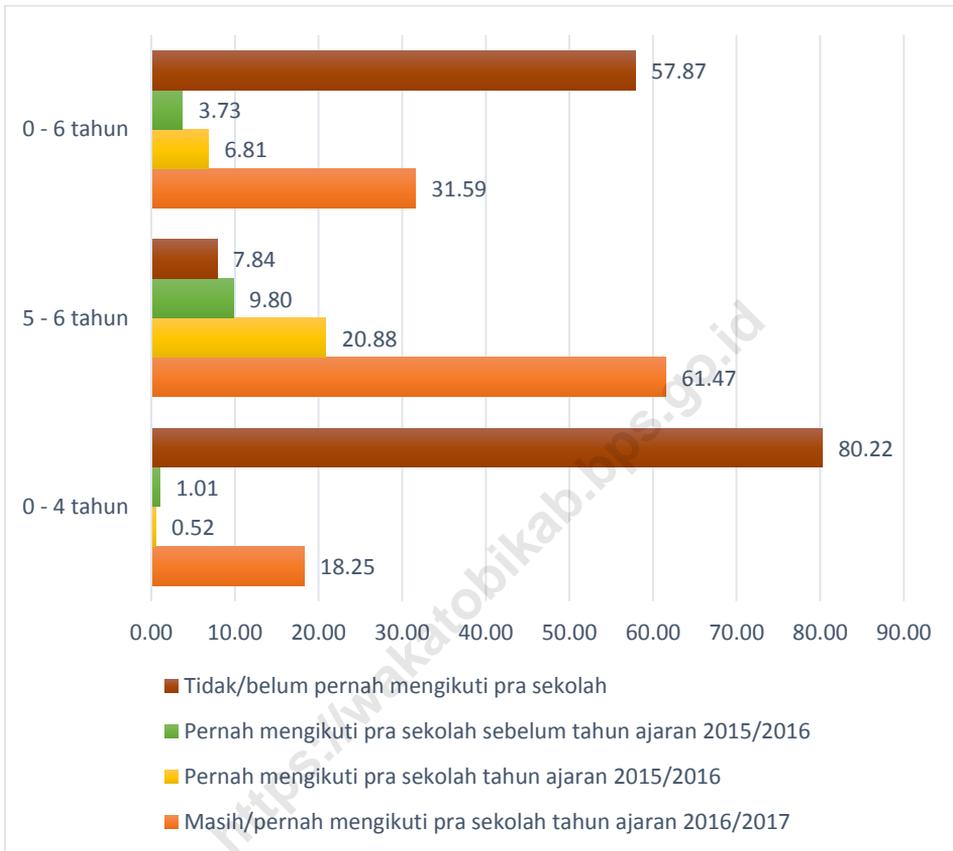
Aset yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan, sehingga setiap warga wajib mengikuti pendidikan, baik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Tidak sedikit penduduk yang masih mengabaikan pendidikan anak usia dini, padahal untuk membiasakan diri dan mengembangkan pola pikir anak pendidikan sejak usia dini mutlak diperlukan.

Tiga tahun pertama anak adalah periode emas anak untuk menyerap informasi sebanyak-banyaknya, sehingga pendidikan usia dini adalah sangat penting. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 50 persen kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun. Sehingga periode ini merupakan periode kritis, dimana perkembangan yang diperoleh pada periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan periode berikutnya hingga masa dewasa. Sementara masa emas ini hanya datang sekali, sehingga apabila terlewatkan berarti habislah peluangnya.

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, pasal 1, butir 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan umur enam tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini (prasekolah) ini bertujuan untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Pada tahun 2017, dari total penduduk Kabupaten Wakatobi umur 0 – 6 tahun, 31,59 persen masih/pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran 2016/2017. Sebanyak 6,81 persen pernah mengikuti pendidikan pra sekolah tahun ajaran 2015/2016 sedangkan 3,73 persen pernah mengikuti pendidikan pra sekolah sebelum tahun ajaran 2015/2016. Akan tetapi, masih banyak penduduk berumur 0 – 6 tahun yang tidak/belum pernah mengikuti pendidikan pra sekolah yaitu sebanyak 57,87 persen.

Grafik 3. Persentase Anak Umur 0-6 Tahun yang Sedang dan Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah Dirinci Menurut Kelompok Umur, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, diolah

Secara total di Kabupaten Wakatobi, dari seluruh anak di usia kritis (0-4 tahun) yang sedang mengikuti pendidikan prasekolah baru mencapai 18,25 persen dan yang pernah mengikuti pendidikan pra sekolah ada sebanyak 1,53 persen. Jika kita bandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya (17,03 persen), pada tahun ajaran 2016/2017 (18,25 persen) terjadi sedikit peningkatan. Akan tetapi hal tersebut masih menunjukkan bahwa peluang untuk memanfaatkan periode kritis hanya dirasakan kurang dari seperlima anak umur kritis di Kabupaten Wakatobi. Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, di samping faktor ekonomi diduga menjadi penyebab rendahnya persentase tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi informasi tentang manfaat pendidikan usia dini perlu lebih digencarkan.

3.3 Rasio Murid-Guru

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik yang memadai merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan. Pada tahun ajaran 2016/2017, sarana dan prasarana pendidikan baik swasta maupun negeri di Kabupaten Wakatobi terlihat cukup memadai pada semua jenjang pendidikan. Oleh karena itu, diharapkan proses kegiatan belajar mengajar pun menjadi lebih baik.

Tabel 1. Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru pada Jenjang Pendidikan TK sederajat di Kabupaten Wakatobi, 2017

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
TK	160	5.019	595
Negeri	0	0	0
Swasta	147	4.600	539
RA/BA	13	419	56

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Tercatat fasilitas pendidikan prasekolah (TK/RA) berjumlah 160 unit yang tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah peserta didik mencapai 5.019 murid. Dengan jumlah tenaga pengajar taman kanak-kanak sebanyak 595 orang, maka secara rata-rata 1 orang guru mengajar 8 hingga 9 anak. Seluruh pendidikan prasekolah ini adalah TK Swasta yang pengelolaannya di bawah yayasan atau kelompok tertentu, dan tidak terdapat TK yang berstatus negeri. Hal ini menunjukkan kepekaan sebagian masyarakat tertentu terhadap pendidikan anak usia dini, sehingga diharapkan masyarakat dari berbagai golongan turut berperan aktif dalam pengembangan kecerdasan anak.

Tabel 2. Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru pada Jenjang Pendidikan SD sederajat di Kabupaten Wakatobi, 2017

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
SD Sederajat	118	12.999	1.064
Negeri	110	12.288	996
Swasta	8	711	68

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Untuk tingkat sekolah dasar negeri maupun swasta baik yang dikelola oleh Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama tercatat 118 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 1.064 orang. Dengan jumlah murid 12.999, maka rasio

murid-guru pada tahun ajaran 2016/2017 adalah 12,22 orang. Dengan kata lain secara rata-rata satu orang guru mempunyai beban mengajar sebanyak kurang lebih 12 sampai 13 orang murid.

Tabel 3. Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru pada Jenjang Pendidikan SMP sederajat di Kabupaten Wakatobi, 2017

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
SMP Sederajat	53	6.532	706
Negeri	44	5.951	615
Swasta	9	581	91

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) sederajat, terdapat 53 sekolah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 sekolah atau 20 persen diantaranya berada di bawah Kementerian Agama yang biasa disebut sebagai Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sekitar 19,21 persen dari total siswa yang duduk di SMP/Sederajat mengenyam pendidikan di MTs. Tercatat dari 6.532 siswa di SMP/ sederajat, sebanyak 1.255 siswa diantaranya adalah siswa MTs baik negeri maupun swasta. Cukup besarnya minat siswa untuk belajar pada jenjang ini juga didukung oleh tenaga pengajar yang memadai. Dari total 706 guru untuk jenjang pendidikan ini, sebanyak 177 guru atau sebesar 25,07 persennya mengajar di Madrasah Tsanawiyah. Dari jumlah ini dapat dihitung angka rasio murid-guru, dimana secara rata-rata rasio murid-guru untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat adalah 9,25 atau rata-rata satu orang guru mempunyai beban mengajar sebanyak kurang lebih 9 sampai 10 orang murid. Kecilnya angka rasio murid-guru ini diharapkan dapat menjadi pendorong kegiatan belajar agar lebih efektif karena beban mengajar guru yang semakin kecil sehingga interaksi antar siswa dan pengajar dapat berlangsung maksimal.

Tabel 4. Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru pada Jenjang Pendidikan SMA sederajat di Kabupaten Wakatobi, 2017

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
SMA Sederajat	30	5.849	589
Negeri	20	5.104	475
Swasta	10	745	114

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi fasilitas pendidikan menurun jumlahnya. Pada tahun ajaran 2016/2017 terdapat 30 sekolah setingkat SMA negeri maupun swasta. Dari keseluruhan jumlah tersebut 5 (2 negeri, 3 swasta) diantaranya merupakan Sekolah Menengah Kejuruan. SMK Negeri terdapat di Kecamatan Kaledupa sebanyak 1 sekolah dan Wangi-wangi sebanyak 1 sekolah. Sedangkan untuk SMK swasta terdapat di Kecamatan Wangi-wangi sebanyak 2 sekolah dan Tomia sebanyak 1 sekolah. Sementara 6 sekolah berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama. Dari total 5.849 siswa yang tercatat menempuh jalur pendidikan SMA sederajat, sebanyak 482 siswa atau 8,24 persen diantaranya bersekolah di SMK. Rata-rata beban sekolah untuk tingkat pendidikan ini adalah 194 sampai 195 murid untuk satu sekolah dan 9 sampai 10 murid untuk satu guru.

Tabel 5. Rasio Murid-Sekolah dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Wakatobi, 2017

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid-Sekolah	Rasio Murid-Guru
(1)	(2)	(3)
TK Sederajat	31,37	8,44
SD Sederajat	110,16	12,22
SMP Sederajat	123,25	9,25
SMA Sederajat	194,97	9,93

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, diolah

Rasio murid-sekolah di atas menunjukkan kemampuan sekolah menampung murid. Sedangkan rasio murid-guru menunjukkan beban kerja guru dalam mengajar. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin kurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Jika melihat kondisi di atas secara umum ketersediaan sekolah dan rasio murid-guru di Kabupaten Wakatobi sudah cukup baik, namun jika dilihat dalam ruang lingkup lebih kecil yakni per kecamatan nampaknya penyebaran sekolah dan guru-guru ini belum begitu merata utamanya untuk tingkat pendidikan di atas pendidikan dasar di daerah terpencil.

3.4 Partisipasi Sekolah

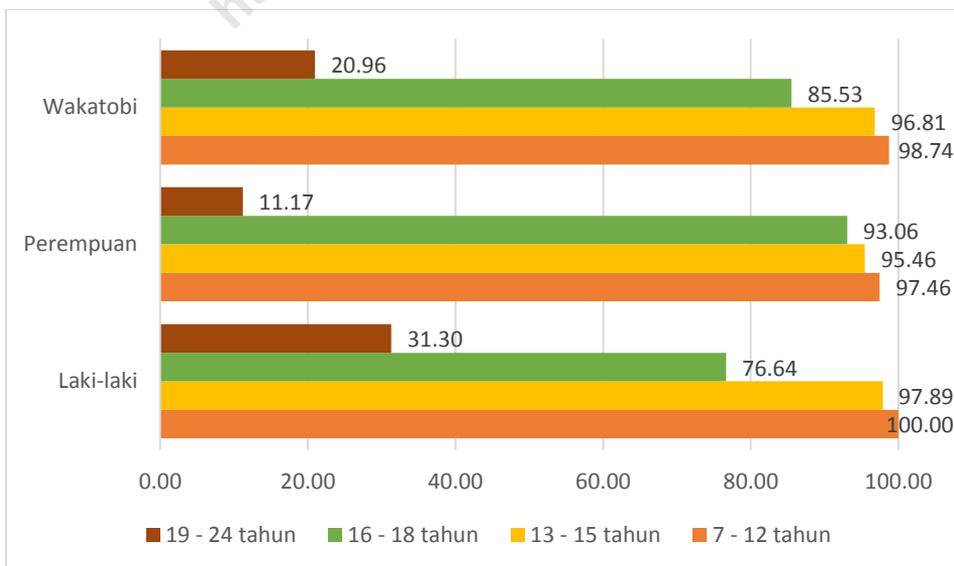
Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk umur sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama umur muda. Ukuran yang banyak digunakan di

sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk umur sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Indikator angka partisipasi sekolah dapat digunakan untuk mengukur proporsi keikutsertaan anak pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu.

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan meningkatkan akses penduduk pada fasilitas pendidikan, sehingga diharapkan makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Wakatobi telah menunjukkan keberhasilan yang cukup besar. Wajib Belajar 6 tahun yang didukung pembangunan infrastruktur sekolah dan diteruskan dengan Wajib Belajar 9 tahun adalah program sektor pendidikan yang diakui cukup sukses dimana standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD lebih dari 95 persen dan APS SMP lebih dari 70 persen.

Grafik 4. Angka Partisipasi Sekolah Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, diolah

Grafik 5 memperlihatkan pada tahun 2017, di Kabupaten Wakatobi APS umur 7 – 12 tahun mencapai 98,74 persen dan APS umur 13 – 15 tahun mencapai 96,81 persen. Meskipun demikian, tidak semua penduduk kelompok umur 7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun, dan 16 – 18 tahun masih bersekolah. Selain itu, juga terlihat semakin tinggi kelompok umur tersebut semakin kecil persentase mereka yang bersekolah. Angka partisipasi sekolah di rentang umur 16 – 18 tahun hanya sebesar 85,53 persen. Artinya, hanya terdapat 85 sampai 86 dari 100 anak umur 16 hingga 18 tahun yang menempuh jenjang pendidikan.

Angka partisipasi sekolah penduduk umur 16 – 18 tahun menjadi titik kritis, karena umumnya pada umur menjelang dewasa tekanan psikologis lebih banyak. Pengendalian anak oleh orang tua sangat diperlukan agar anak-anak mereka tetap fokus pada kewajiban bersekolah, tidak terpengaruh oleh godaan mencari pendapatan (bekerja), berumah tangga, dan sebagainya. Namun, kepedulian orang tua dan para pendidik dalam masa kritis ini harus diakui akan sangat ditentukan oleh cara pandang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini perlu ditinjau lebih jauh mengapa mereka tidak bersekolah lagi terutama untuk kelompok umur 7 – 15 tahun dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun.

Maju mundurnya pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak. Pendidikan merupakan kegiatan bersama yang melibatkan banyak unsur, mulai siswa itu sendiri, masyarakat, orang tua, pendidik, sarana dan prasarana, manajemen dan biaya pendidikan, proses belajar mengajar, hingga campur tangan pemerintah. Jadi tanggung jawab pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru atau sekolah atau kementerian pendidikan saja, melainkan semua pihak harus terlibat dalam memajukan dunia pendidikan.

Umumnya, terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Keduanya mengukur penyerapan penduduk umur sekolah oleh sektor pendidikan. Perbedaan di antara keduanya adalah penggunaan kelompok umur “standar” di setiap jenjang pendidikan. Umur standar yang dimaksud adalah rentang umur yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai untuk setiap jenjang pendidikan, yang ditampilkan pada tabel berikut.

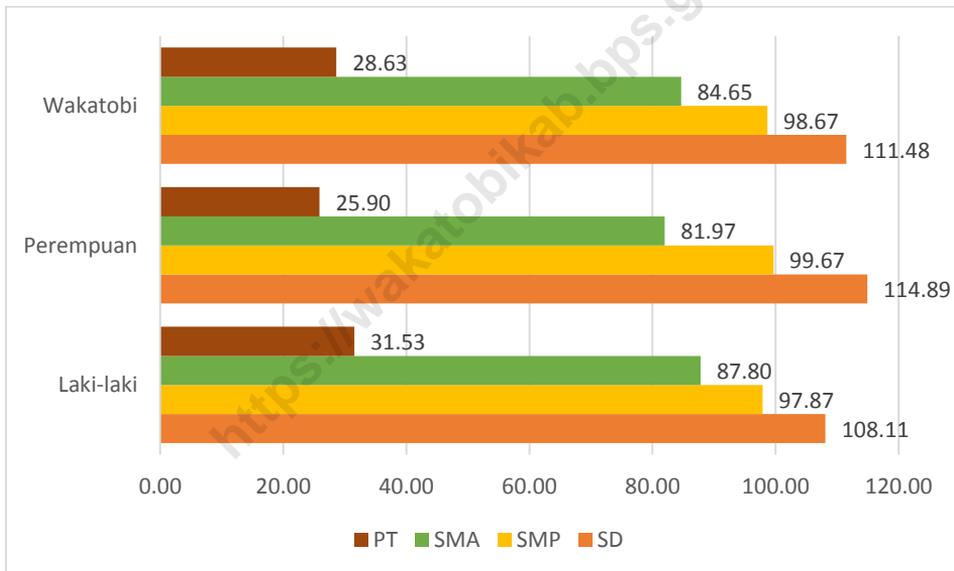
Tabel 6. Umur Standar di Setiap Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Kelompok Umur (Tahun)
(1)	(2)
SD	7-12
SMP	13-15
SMA	16-18
Perguruan Tinggi	19-24

Sumber: Statistik Indonesia, 2010

APK digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat batasan umur terhadap jumlah anak dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Grafik 5 menunjukkan pada tahun 2017, APK SD mencapai 111,48. Artinya pada tingkat sekolah dasar terdapat 111,48 persen penduduk yang bersekolah. Ini berarti bahwa jumlah murid sekolah pada jenjang sekolah dasar lebih besar daripada jumlah penduduk 7-12 tahun atau ada sekitar 11,48 persen penduduk di luar umur SD (7 – 12 tahun) yang bersekolah di SD. APK penduduk Kabupaten Wakatobi menurun untuk tingkat pendidikan SMP dan jenjang SMA. Pada jenjang SMP, APK menjadi 98,67, sedangkan pada jenjang SMA APK mencapai 84,65.

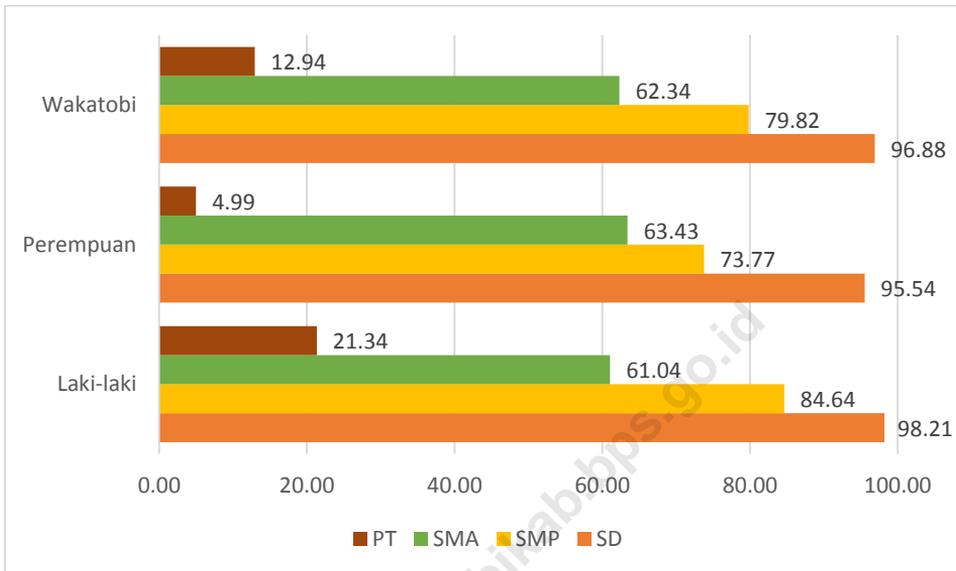
Grafik 5. Angka Partisipasi Kasar Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, diolah

Sama halnya dengan APK, Angka Partisipasi Murni (APM) juga cenderung menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Grafik 6). APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Pada APM, umur anak sekolah di setiap jenjang pendidikan sangat diperhatikan. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan banyaknya anak yang sekolah di luar sistem pendidikan, seperti menunda saat mulai bersekolah, murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah untuk sementara waktu dan lulus lebih awal.

Grafik 6. Angka Partisipasi Murni Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, diolah

Untuk jenjang SD (7 – 12 tahun) terlihat bahwa APK mencapai 111,48 persen sementara APM 96,88 persen. Selisih 14,6 persen memiliki arti bahwa di antara murid SD/ sederajat sebanyak 14,6 persen berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APM SMP pada 2016 mencapai angka 79,82 persen sedangkan APK-nya mencapai 98,67 persen. Ini artinya hanya 79,82 persen penduduk umur 13 – 15 tahun yang terserap sebagai siswa SMP, sisanya bisa terserap pada jenjang pendidikan SD, SMA, atau bahkan tidak bersekolah lagi. Selisih 18,85 persen dapat diartikan sebagai jumlah murid SMP yang umurnya berada di luar rentang 13 – 15 tahun. Begitu pula untuk jenjang SMA (16 – 18 tahun), terdapat selisih yang cukup besar, sekitar 22,31 persen siswa SMA yang berumur di atas 18 tahun atau di bawah 15 tahun. Hal ini dimungkinkan karena banyak anak yang bersekolah lebih dini dari anak lain, atau sebaliknya.

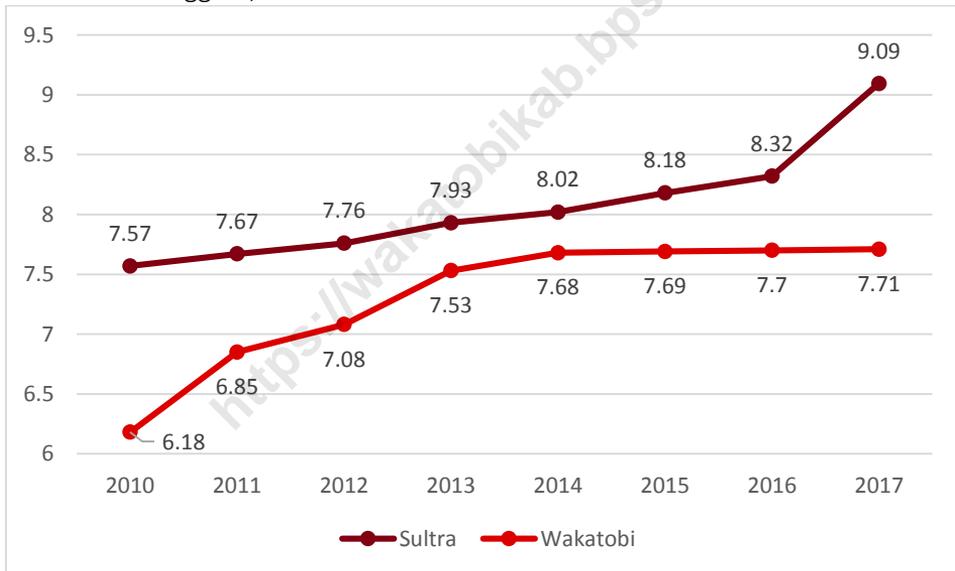
3.5 Rata-rata Lama Sekolah

Secara umum, pencapaian pendidikan penduduk dapat dilihat dari rata-rata lama bersekolah. Indikator ini dapat menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa penduduk di suatu wilayah dapat menikmati pendidikan. Semakin lama sekolah yang dilalui diharapkan semakin bagus kualitas dan keterampilan yang dimiliki. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index-HDI) dan maksimum lama sekolah yang harus dicapai adalah 15 tahun – ditetapkan

oleh UNDP – atau paling tidak penduduk telah menamatkan suatu jenjang akademi.

Indikator rata-rata lama sekolah (Mean Years of Schooling/MYS) merupakan jumlah tahun yang digunakan penduduk umur 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir dan asumsi dalam keadaan normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. MYS dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan, yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Dari penghitungan dengan menggunakan pola hubungan antar variabel-variabel tersebut akan diperoleh data lama sekolah masing-masing individu.

Grafik 7. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Wakatobi dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2010 – 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Wakatobi dari tahun 2010 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2010 hingga 2011, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Wakatobi masih berada di bawah 7 tahun, yakni 6,18 tahun dan meningkat menjadi 6,85 pada tahun 2011, kemudian terus meningkat setiap tahunnya menjadi 7,71 di tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017, rata-rata penduduk 25 tahun ke atas mengenyam bangku sekolah selama 7,71 tahun. Artinya rata-rata penduduk Kabupaten Wakatobi baru dapat menjalannya sampai kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP. Kondisi ini menggambarkan program wajib belajar sembilan tahun belum membuahkan hasil yang maksimal.

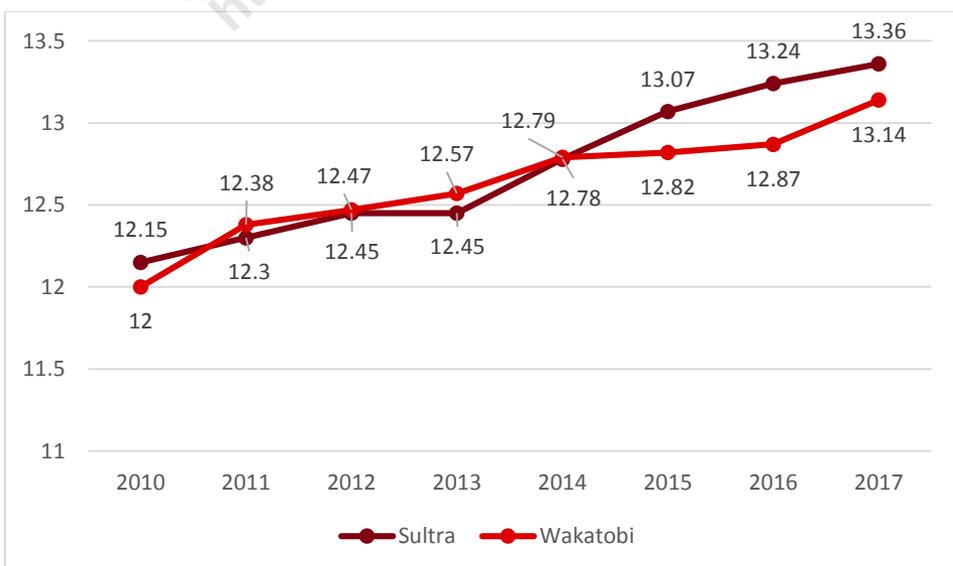
Jika dilihat pada Grafik 7, rata-rata lama sekolah Kabupaten Wakatobi selalu berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana selama lima tahun terakhir keduanya menunjukkan tren yang sama-sama meningkat. Hal ini merupakan PR besar bagi pemerintah Kabupaten Wakatobi agar lebih menggalakkan program wajib belajar sembilan tahun.

3.6 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling/EYS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. EYS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. EYS dihitung pada umur 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, EYS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Wakatobi dari tahun 2010 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2010, rata-rata harapan lama sekolah adalah 12 tahun dan terus meningkat menjadi 13,14 tahun pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 harapan penduduk Kabupaten Wakatobi yang berumur 7 tahun ke atas mengenyam bangku sekolah selama 13,14 tahun, artinya rata-rata penduduk Kabupaten Wakatobi mempunyai harapan berpendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tamat Diploma I.

Grafik 8. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wakatobi dan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2010 – 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Hal ini menjadi tantangan bagi semua pihak yang terkait agar dapat mewujudkan harapan lama sekolah tersebut. Terkait dengan angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Wakatobi di tahun 2017 yang cenderung menurun seiring dengan kenaikan jenjang pendidikan. Perlu dipikirkan bagaimana cara mempertahankan anak yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas agar dapat menamatkan pendidikannya bahkan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

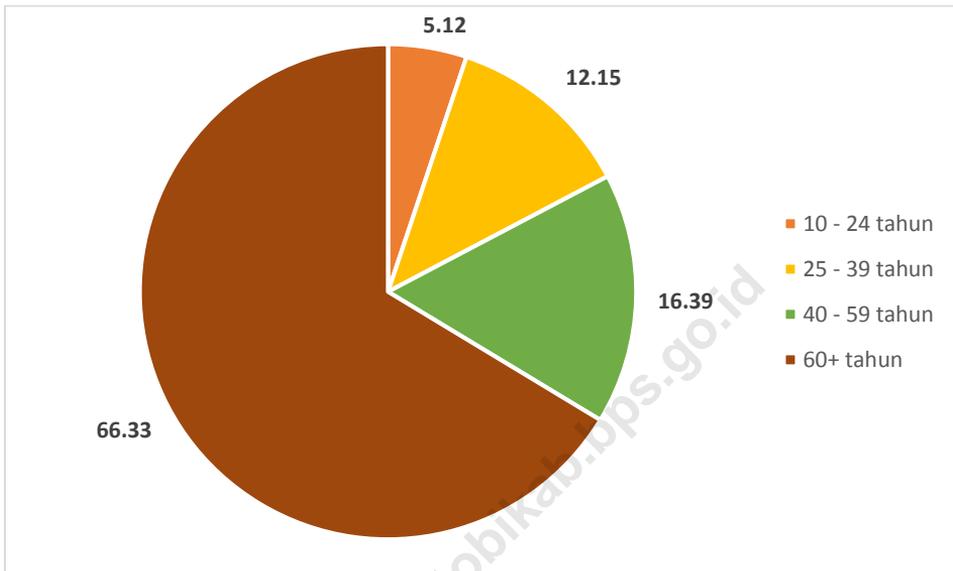
Bila dibandingkan dengan harapan lama sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara selama tahun 2010 hingga 2017, rata-rata harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Wakatobi masih di bawah harapan lama sekolah penduduk se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Meskipun sama-sama menunjukkan pola yang meningkat setiap tahunnya, harapan lama sekolah Kabupaten Wakatobi dan Provinsi Sulawesi Tenggara masih jauh bila dibandingkan dengan batas maksimum EYS ketentuan UNDP (18 tahun).

3.7 Tingkat Pendidikan

Selain rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga merupakan salah satu indikator penting yang dapat mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan pendidikan dan juga merupakan gambaran tentang kualitas suatu penduduk. Semakin banyak persentase penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi memperbesar peluang semakin baik kualitas SDM-nya.

Dari segi tingkat pendidikan dan status bersekolah, terlihat bahwa persentase penduduk 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah mengenyam bangku pendidikan relatif rendah, yakni sebesar 4,24 persen. Jika dilihat lebih jauh menurut kelompok umur (Grafik 9), maka dari seluruh penduduk 10 tahun ke atas yang tidak pernah sekolah, ternyata sebagian besar adalah penduduk umur 60 tahun ke atas yaitu sebanyak 66,33 persen, 16,39 persen pada umur 40 – 59 tahun, 12,15 persen pada umur 25 – 39 tahun, dan 5,12 persen pada umur 10 – 24 tahun. Apabila kita melihat secara keseluruhan, semakin tua kelompok umurnya maka semakin besar pula persentase penduduk yang tidak/belum pernah bersekolahnya. Hal ini dikarenakan akses pendidikan pada beberapa puluh tahun silam masih sulit dan pada masa itu sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Walaupun persentasenya semakin mengecil pada kelompok umur yang lebih muda, pemerintah tetap harus memperhatikan masalah ini agar kedepannya angka penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah dapat lebih diperkecil atau bahkan menjadi tidak ada sama sekali.

Grafik 9. Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Bersekolah Dirinci Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, diolah

Sementara itu, pada Tabel 7 masih terlihat kesenjangan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan, dimana proporsi penduduk perempuan (3,17 persen) yang tidak pernah sekolah jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki (1,07 persen).

Tabel 7. Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Status Bersekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017

Status Bersekolah	Laki-laki	Perempuan	Wakatobi
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	1,07	3,17	4,24
Masih Bersekolah	13,20	12,82	26,02
- SD Sederajat	4,02	4,37	8,39
- SMP Sederajat	4,59	3,73	8,32
- SMA Sederajat	3,19	3,51	6,71
- Diploma ke Atas	1,39	1,21	2,60
Tidak Bersekolah Lagi	33,03	36,72	69,74

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, diolah

Pada Tabel 8, penduduk Kabupaten Wakatobi berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah adalah sekitar 4,24 persen. Kemudian banyaknya penduduk yang tidak/belum menamatkan pendidikannya di bangku Sekolah Dasar relatif besar yaitu sebanyak 24,61 persen. Sementara yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai jenjang SD mencapai 27,63 persen. Itu artinya sekitar 4,24 persen penduduk Kabupaten Wakatobi belum optimal merasakan manfaat pembangunan di bidang pendidikan seperti yang dicanangkan pemerintah pada Program Wajib Belajar 9 Tahun. Proporsi ini bahkan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Terdapat 16,26 persen yang berhasil menamatkan jenjang SMP sederajat. Kemudian yang berhasil menamatkan jenjang SMA sederajat hanya sebesar 16,93 persen. Bahkan hanya sebanyak 10,33 persen yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan diploma ke atas.

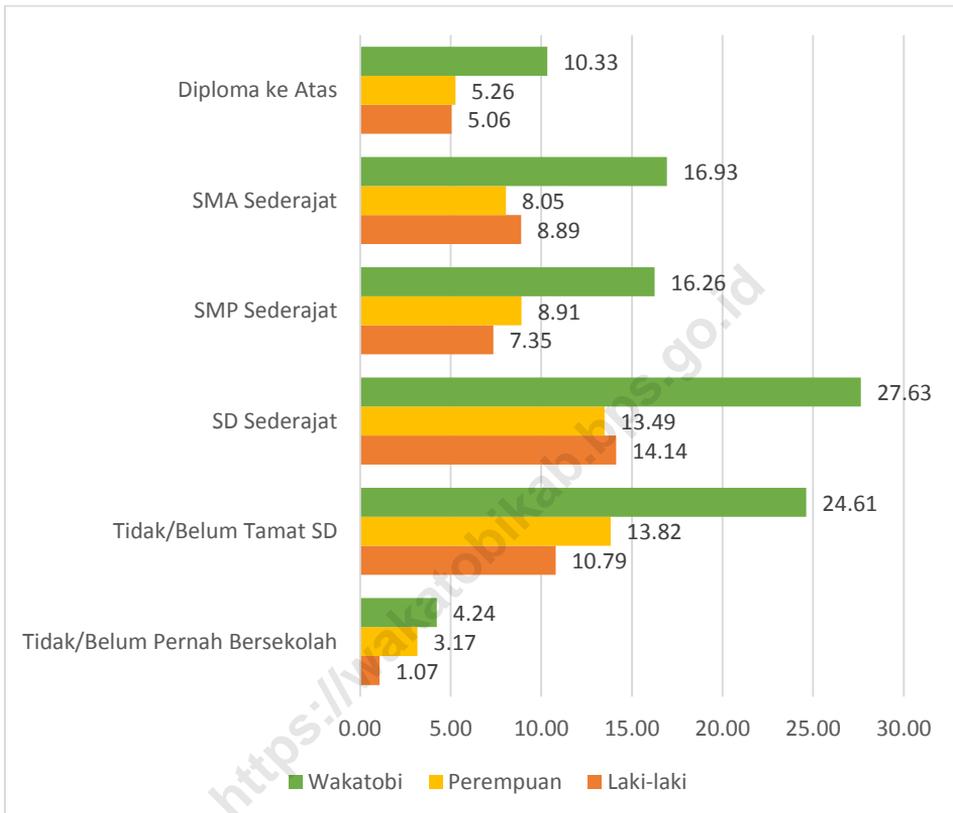
Tabel 8. Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017

Status Bersekolah	Laki-laki	Perempuan	Wakatobi
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	1,07	3,17	4,24
Tidak/Belum Tamat SD	10,79	13,82	24,61
SD Sederajat	14,14	13,49	27,63
SMP Sederajat	7,35	8,91	16,26
SMA Sederajat	8,89	8,05	16,93
Diploma ke Atas	5,06	5,26	10,33

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, diolah

Dilihat dari sisi jenis kelamin, Grafik 10 memperlihatkan bahwa pada jenjang SMP sederajat dan diploma ke atas proporsi penduduk perempuan yang berijazah cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Sedangkan pada jenjang SD sederajat dan SMA sederajat proporsi penduduk laki-laki yang berijazah cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan.

Grafik 10. Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi (Persen), 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, diolah

3.8 Akses Teknologi Informasi

Faktor lain yang turut mempengaruhi kualitas pendidikan adalah akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Jika dimanfaatkan dengan baik maka TIK bisa berperan positif terhadap kemajuan pendidikan. Dengan hadirnya TIK, orang-orang yang tersebar di berbagai tempat bisa saling bertukar informasi atau berinteraksi dengan cepat dan efisien, tidak tergantung pada lokasi mereka ataupun perbedaan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Sebagai contoh, seorang siswa yang tinggal di daerah yang terpencil bisa mengambil informasi atau memperoleh pengetahuan yang sebenarnya terletak ribuan atau bahkan ratusan ribu kilometer darinya.

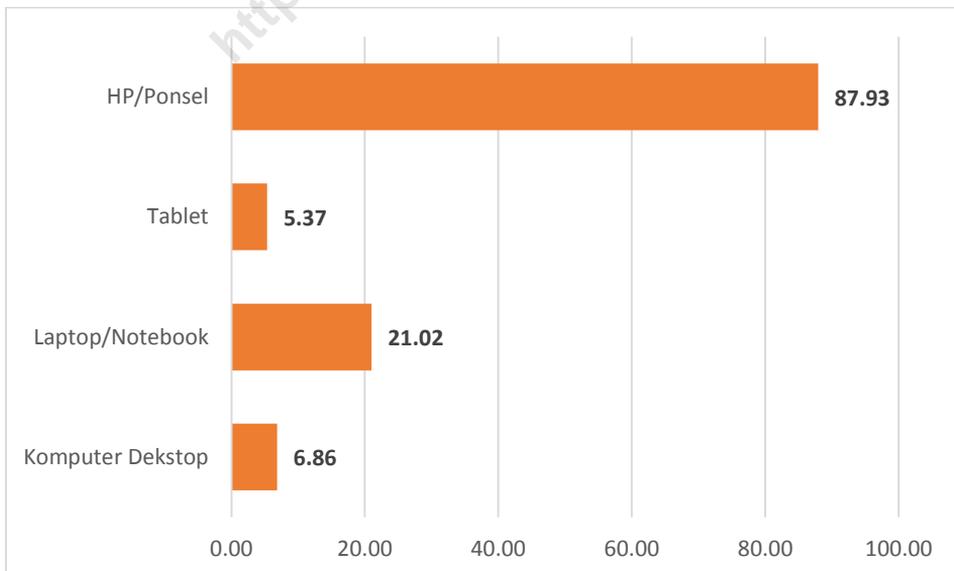
TIK bisa diakses berbagai sumber diantaranya telepon rumah dan telepon seluler. Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin

ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya persentase kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan telepon seluler. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunaannya.

Masyarakat kini cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, tersedianya fitur games, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain.

Pada tahun 2017, penggunaan telepon seluler meningkat 8,54 persen dibanding tahun 2016 menjadi 67,76 persen. Peningkatan pengguna telepon seluler sebanding dengan peningkatan pengguna internet. Media internet digunakan karena memiliki sifat instan, interaktif dan menarik. Pada tahun 2017, secara umum terjadi peningkatan sebesar 1,27 persen terhadap penduduk umur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir dari waktu pencacahan, dari 18,60 persen di tahun sebelumnya menjadi 19,87 persen. Potensi pengguna internet yang meningkat ini bisa menjadi motivasi bagi dunia bisnis telekomunikasi untuk memperluas jangkauan akses internet yang masih terbatas untuk beberapa wilayah di Kabupaten Wakatobi.

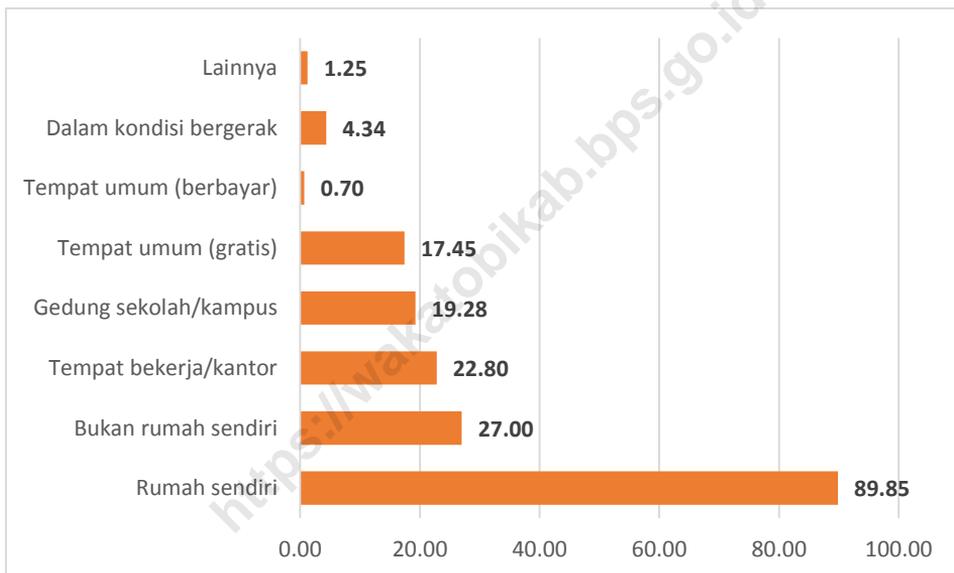
Grafik 11. Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Dirinci Menurut Media Mengakses Internet di Kabupaten Wakatobi, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, diolah

Penggunaan HP sebagai media akses internet mengalami penurunan. Di tahun 2017, dari seluruh pengguna internet umur 5 tahun ke atas, sekitar 87,93 persen mengakses melalui media HP. Sedangkan penggunaan media laptop/notebook untuk mengakses internet mengalami peningkatan menjadi 21,02 persen. Terdapat sebanyak 6,86 persen yang menggunakan media komputer dekstop untuk mengakses internet. Kemudian sisanya sebesar 5,37 persen menggunakan media tablet untuk mengakses internet.

Grafik 12. Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Dirinci Menurut Lokasi Mengakses Internet di Kabupaten Wakatobi, 2017



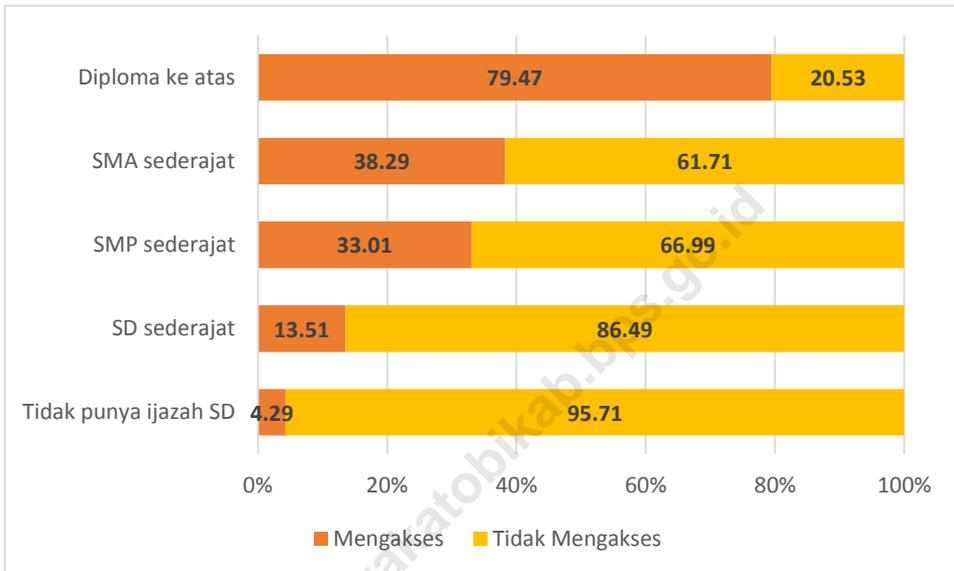
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, diolah

Dilihat dari lokasi mengakses internet, persentase terbesar penduduk 5 tahun ke atas mengakses internet di rumah sendiri sebanyak 89,85 persen. Sebanyak 27 persen mengakses di bukan rumah sendiri. Kemudian 22,80 persen dan 19,28 persen mengakses di tempat bekerja/kantor dan gedung sekolah.kampus. Sisanya berturut-turut sebanyak 17,45 persen, 4,34 persen, 1,25 persen, dan 0,70 mengakses di tempat umum (gratis), dalam kondisi bergerak, lainnya, dan tempat umum (berbayar).

Penggunaan internet di sekolah hanya sekitar 19,28 persen. Angka ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan banyaknya penduduk umur 5 tahun ke atas yang berstatus masih bersekolah yang mencapai 26,02 persen. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana akses internet di dunia pendidikan memegang peranan penting untuk peningkatan akses TIK (multimedia). Ditinjau

menurut tingkat pendidikan, persentase pengguna internet meningkat seiring meningkatnya tingkat pendidikan seperti ditampilkan Grafik 14.

Grafik 13. Persentase Pengguna Internet Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Wakatobi, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, diolah

Berdasarkan grafik di atas, dapat kita lihat bahwa pengguna internet didominasi oleh penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang ditamatkan diploma ke atas yaitu sebesar 79,47 persen. Kemudian persentase terbesar kedua berada pada penduduk yang memiliki jenjang pendidikan yang ditamatkan SMA sederajat yaitu sebesar 38,29 persen. Untuk jenjang pendidikan yang ditamatkan SMP sederajat ada sebesar 33,01 persen yang menggunakan internet. Sedangkan penduduk dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah SD sederajat hanya terdapat 13,51 persen yang mengakses internet. Persentase pengguna internet terkecil berada pada penduduk yang tidak memiliki ijazah SD yaitu hanya sebanyak 4,29 persen. Dari Grafik 14 kita dapat mengetahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula persentase seseorang untuk mengakses internet.

Grafik 14. Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Dirinci Menurut Tujuan Mengakses Internet di Kabupaten Wakatobi, 2017



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, diolah

Jika dilihat dari tujuan mengakses internet, tujuan mendapat informasi/berita memiliki persentase terbesar yaitu sebesar 63,53 persen. Sebesar 51,95 persen penduduk mengakses internet dengan tujuan untuk media sosial/jejaring sosial. Sebesar 35,30 persen orang mengakses internet dengan tujuan untuk hiburan. Ada sebanyak 34,24 persen pelajar yang menggunakan internet untuk mengerjakan tugas sekolah. Sebesar 19,47 persen penduduk mengakses internet untuk mengirim/menerima e-mail. Sisanya sebanyak 10,42 persen untuk mendapatkan informasi mengenai barang/jasa, 6,87 persen untuk pembelian barang/jasa, 5,57 persen untuk penjualan barang/jasa, 0,27 persen untuk lainnya, dan 0,18 persen untuk fasilitas finansial.

<https://wakatobikab.bps.go.id>

<https://www.katobikab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Tabel L1. Jumlah Sekolah di Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2017

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU/SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binongko	10	13	3	3
Togo Binongko	5	7	3	1
Tomia	17	10	4	3
Tomia Timur	21	13	5	1
Kaledupa	16	13	5	3
Kaledupa Selatan	20	10	6	2
Wangi-wangi	34	22	8	3
Wangi-wangi Selatan	24	22	9	8
Wakatobi	147	110	43	24

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wakatobi

Tabel L2. Jumlah Murid di Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2017

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU/SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binongko	433	1172	457	659
Togo Binongko	174	721	292	140
Tomia	346	978	401	420
Tomia Timur	487	1037	490	471
Kaledupa	522	1057	507	602
Kaledupa Selatan	500	900	526	347
Wangi-wangi	1248	3058	1320	1291
Wangi-wangi Selatan	890	3216	1294	1064
Wakatobi	4600	12139	5287	4994

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wakatobi

Tabel L3. Jumlah Guru di Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2017

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU/SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binongko	35	92	46	51
Togo Binongko	19	45	26	9
Tomia	56	74	46	42
Tomia Timur	54	111	55	39
Kaledupa	74	119	55	51
Kaledupa Selatan	84	99	69	26
Wangi-wangi	145	221	131	121
Wangi-wangi Selatan	72	222	101	101
Wakatobi	539	983	529	440

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wakatobi

Tabel L4. Jumlah Sekolah di Luar Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2017

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binongko	0	1	1	0
Togo Binongko	0	0	1	2
Tomia	0	0	1	1
Tomia Timur	1	0	1	0
Kaledupa	2	2	2	0
Kaledupa Selatan	0	0	0	1
Wangi-wangi	6	3	2	1
Wangi-wangi Selatan	4	2	2	1
Wakatobi	13	8	10	6

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Tabel L5. Jumlah Murid di Luar Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2017

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binongko	0	15	166	0
Togo Binongko	0	0	70	182
Tomia	0	0	90	63
Tomia Timur	20	0	24	0
Kaledupa	95	181	166	0
Kaledupa Selatan	0	0	0	130
Wangi-wangi	198	245	542	77
Wangi-wangi Selatan	106	419	197	403
Wakatobi	419	860	1255	855

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Tabel L6. Jumlah Guru di Luar Lingkungan Depdikbud menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan, 2017

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binongko	0	3	27	0
Togo Binongko	0	0	9	48
Tomia	0	0	17	23
Tomia Timur	3	0	10	0
Kaledupa	9	20	29	0
Kaledupa Selatan	0	0	0	15
Wangi-wangi	28	24	49	18
Wangi-wangi Selatan	16	34	36	45
Wakatobi	56	81	177	149

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi

Tabel L7. Jumlah Sekolah Setingkat Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	0	10	10	0	0	0
Togo Binongko	0	5	5	0	0	0
Tomia	0	17	17	0	0	0
Tomia Timur	0	21	21	0	1	1
Kaledupa	0	16	16	0	2	2
Kaledupa Selatan	0	20	20	0	0	0
Wangi-wangi	0	34	34	0	6	6
Wangi-wangi Selatan	0	24	24	0	4	4
Wakatobi	0	147	147	0	13	13

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L8.. Jumlah Sekolah Setingkat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	13	0	13	0	1	1
Togo Binongko	7	0	7	0	0	0
Tomia	10	0	10	0	0	0
Tomia Timur	13	0	13	0	0	0
Kaledupa	13	0	13	0	2	2
Kaledupa Selatan	10	0	10	0	0	0
Wangi-wangi	22	0	22	0	3	3
Wangi-wangi Selatan	21	1	22	1	1	2
Wakatobi	109	1	110	1	7	8

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L9. Jumlah Sekolah Setingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	3	0	3	1	0	1
Togo Binongko	3	0	3	0	1	1
Tomia	4	0	4	1	0	1
Tomia Timur	5	0	5	0	1	1
Kaledupa	5	0	5	1	1	2
Kaledupa Selatan	6	0	6	0	0	0
Wangi-wangi	7	1	8	1	1	2
Wangi-wangi Selatan	7	2	9	0	2	2
Wakatobi	40	3	43	4	6	10

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L10. Jumlah Sekolah Setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	3	0	3	0	0	0
Togo Binongko	1	0	1	1	1	2
Tomia	2	1	3	0	1	1
Tomia Timur	1	0	1	0	0	0
Kaledupa	2	1	3	0	0	0
Kaledupa Selatan	2	0	2	0	1	1
Wangi-wangi	4	2	6	0	1	1
Wangi-wangi Selatan	3	2	5	1	0	1
Wakatobi	18	6	24	2	4	6

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L11. Jumlah Murid Setingkat Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	0	433	433	0	0	0
Togo Binongko	0	174	174	0	0	0
Tomia	0	346	346	0	0	0
Tomia Timur	0	487	487	0	20	20
Kaledupa	0	522	522	0	95	95
Kaledupa Selatan	0	500	500	0	0	0
Wangi-wangi	0	1248	1248	0	198	198
Wangi-wangi Selatan	0	890	890	0	106	106
Wakatobi	0	4600	4600	0	419	419

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L12. Jumlah Murid Setingkat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	1172	0	1172	0	15	15
Togo Binongko	721	0	721	0	0	0
Tomia	978	0	978	0	0	0
Tomia Timur	1037	0	1037	0	0	0
Kaledupa	1057	0	1057	0	181	181
Kaledupa Selatan	900	0	900	0	0	0
Wangi-wangi	3058	0	3058	0	245	245
Wangi-wangi Selatan	3112	104	3216	253	166	419
Wakatobi	12035	104	12139	253	607	860

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L13. Jumlah Murid Setingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	457	0	457	156	0	156
Togo Binongko	292	0	292	0	70	70
Tomia	401	0	401	90	0	90
Tomia Timur	490	0	490	0	24	24
Kaledupa	507	0	507	115	41	156
Kaledupa Selatan	526	0	526	0	0	0
Wangi-wangi	1239	81	1320	497	55	552
Wangi-wangi Selatan	1181	113	1294	0	197	197
Wakatobi	5093	194	5287	858	387	1245

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L14. Jumlah Murid Setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	659	0	659	0	0	0
Togo Binongko	140	0	140	111	71	182
Tomia	395	25	420	0	63	63
Tomia Timur	471	0	471	0	0	0
Kaledupa	545	57	602	0	0	0
Kaledupa Selatan	347	0	347	0	130	130
Wangi-wangi	1122	169	1291	0	77	77
Wangi-wangi Selatan	911	153	1064	403	0	403
Wakatobi	4590	404	4994	514	341	855

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L15. Jumlah Guru Setingkat Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	0	35	35	0	0	0
Togo Binongko	0	19	19	0	0	0
Tomia	0	56	56	0	0	0
Tomia Timur	0	54	54	0	3	3
Kaledupa	0	74	74	0	9	9
Kaledupa Selatan	0	84	84	0	0	0
Wangi-wangi	0	145	145	0	28	28
Wangi-wangi Selatan	0	72	72	0	16	16
Wakatobi	0	539	539	0	56	56

Sumber : Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L16. Jumlah Guru Setingkat Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	92	0	92	0	3	3
Togo Binongko	45	0	45	0	0	0
Tomia	74	0	74	0	0	0
Tomia Timur	111	0	111	0	0	0
Kaledupa	119	0	119	0	20	20
Kaledupa Selatan	99	0	99	0	0	0
Wangi-wangi	221	0	221	0	24	24
Wangi-wangi Selatan	215	7	222	20	14	34
Wakatobi	976	7	983	20	61	81

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L17. Jumlah Guru Setingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	46	0	46	27	0	27
Togo Binongko	26	0	26	0	9	9
Tomia	46	0	46	17	0	17
Tomia Timur	55	0	55	0	10	10
Kaledupa	55	0	55	19	10	29
Kaledupa Selatan	69	0	69	0	0	0
Wangi-wangi	123	8	131	38	11	49
Wangi-wangi Selatan	94	7	101	0	36	36
Wakatobi	514	15	529	101	76	177

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L18. Jumlah Guru Setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Bawah Pengawasan Depdikbud dan Departemen Lainnya menurut Kecamatan, 2017

Kecamatan	Depdikbud			Departemen Lainnya		
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binongko	51	0	51	0	0	0
Togo Binongko	9	0	9	31	17	48
Tomia	34	8	42	0	23	23
Tomia Timur	39	0	39	0	0	0
Kaledupa	50	1	51	0	0	0
Kaledupa Selatan	26	0	26	0	15	15
Wangi-wangi	105	16	121	0	18	18
Wangi-wangi Selatan	85	16	101	45	0	45
Wakatobi	399	41	440	76	73	149

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L19. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Binongko, 2017

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	10	433	35
Sekolah Dasar	13	1172	92	0	0	0
SLTP	3	457	46	0	0	0
SMU/SMK	3	659	51	0	0	0
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	0	0	0
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	1	15	3
Madrasah Tsanawiyah	1	156	27	0	0	0
Madrasah Aliyah	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L20. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Togo Binongko, 2017

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	5	174	19
Sekolah Dasar	7	721	45	0	0	0
SLTP	3	292	26	0	0	0
SMU/SMK	1	140	9	0	0	0
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	0	0	0
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	0	0	0
Madrasah Tsanawiyah	0	0	0	1	70	9
Madrasah Aliyah	1	111	31	1	71	17

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L21. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Tomia, 2017

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	17	346	56
Sekolah Dasar	10	978	74	0	0	0
SLTP	4	401	46	0	0	0
SMU/SMK	2	395	34	1	25	8
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	0	0	0
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	0	0	0
Madrasah Tsanawiyah	1	90	17	0	0	0
Madrasah Aliyah	0	0	0	1	63	23

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L22. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Tomia Timur, 2017

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	21	487	54
Sekolah Dasar	13	1037	111	0	0	0
SLTP	5	490	55	0	0	0
SMU/SMK	1	471	39	0	0	0
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	1	20	3
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	0	0	0
Madrasah Tsanawiyah	0	0	0	1	24	10
Madrasah Aliyah	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L23. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Kaledupa, 2017

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	16	522	74
Sekolah Dasar	13	1057	119	0	0	0
SLTP	5	507	55	0	0	0
SMU/SMK	2	545	50	1	57	1
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	2	95	9
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	2	181	20
Madrasah Tsanawiyah	1	115	19	1	41	10
Madrasah Aliyah	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L24. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Kaledupa Selatan, 2017

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	20	500	84
Sekolah Dasar	10	900	99	0	0	0
SLTP	6	526	69	0	0	0
SMU/SMK	2	347	26	0	0	0
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	0	0	0
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	0	0	0
Madrasah Tsanawiyah	0	0	0	0	0	0
Madrasah Aliyah	0	0	0	1	130	15

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L25. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Wangi-Wangi, 2017

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	34	1248	145
Sekolah Dasar	22	3058	221	0	0	0
SLTP	7	1239	123	1	81	8
SMU/SMK	4	1122	105	2	169	16
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	6	198	28
Madrasah Ibtidaiyah	0	0	0	3	245	24
Madrasah Tsanawiyah	1	497	38	1	55	11
Madrasah Aliyah	0	0	0	1	77	18

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L26. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 2017

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	24	890	72
Sekolah Dasar	21	3112	215	1	104	7
SLTP	7	1181	94	2	113	7
SMU/SMK	3	911	85	2	153	16
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	4	106	16
Madrasah Ibtidaiyah	1	253	20	1	166	14
Madrasah Tsanawiyah	0	0	0	2	197	36
Madrasah Aliyah	1	403	45	0	0	0

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L27. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Negeri dan Swasta menurut Departemen yang Membawahinya dan Jenis Sekolah di Kabupaten Wakatobi, 2017

Departemen	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Depdikbud						
Taman Kanak-Kanak	0	0	0	147	4600	539
Sekolah Dasar	109	12035	976	1	104	7
SLTP	40	5093	514	3	194	15
SMU/SMK	18	4590	399	6	404	41
Dep. Agama						
Raudatul Athfal	0	0	0	13	419	56
Madrasah Ibtidaiyah	1	253	20	7	607	61
Madrasah Tsanawiyah	4	858	101	6	387	76
Madrasah Aliyah	2	514	76	4	341	73

Sumber: Dinas Dikbud dan Kemenag

Tabel L28. Jumlah Alumni di Perguruan Tinggi menurut Lembaga Pendidikan di Wakatobi, TA 2017/2018

Lembaga Pendidikan	Semester Ganjil		
	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam	15	21	36
Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi	-	-	-

Sumber: Perguruan Tinggi se-Wakatobi

Tabel L29. Jumlah Dosen Pengajar pada Perguruan Tinggi menurut Lembaga Pendidikan di Wakatobi, TA 2017/2018

Lembaga Pendidikan	Dosen Tetap	Dosen Tidak Tetap	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam	41	12	53
Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi	12	1	13

Sumber: Perguruan Tinggi se-Wakatobi

Tabel L30. Jumlah Mahasiswa Terdaftar pada Perguruan Tinggi menurut Lembaga Pendidikan di Wakatobi, TA 2017/2018

Lembaga Pendidikan	Semester Ganjil			Semester Genap		
	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam	140	244	384	140	244	384
Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi	35	15	50	33	15	48

Sumber: Perguruan Tinggi se-Wakatobi

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://wakatobikab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAKATOBI**

Jalan Utudae Samad No. 25, Kel. Mandati III,
Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, 93795
Telp: (0404)2222003
Homepage: <http://wakatobikab.bps.go.id>
Email: bps7407@bps.go.id